

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DALAM MENYIKAPI KEBERAGAMAN DI SEKOLAH INKLUSI

Primandha Sukma Nur Wardhani
Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Primandhas@gmail.com

Abstrak

Sekolah Inklusi merupakan sekolah regular (biasa) yang menerima anak berkebutuhan khusus dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus (ATBK) dan anak berkebutuhan khusus melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarananya. Sekolah inklusi memiliki siswa heterogen dengan menempatkan siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal dalam satu lingkungan. Heterogenitas dalam sekolah inklusi terdiri dari perbedaan ras, suku, agama, bahasa, bahasa, kondisi fisik dan mental. Kondisi tersebut menjadikan toleransi penting ditanamkan di sekolah inklusi untuk menanamkan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan antarsiswa. Salah satu alternatif untuk menjembatani permasalahan tersebut adalah melalui pembelajaran berbasis multikultural. Di Indonesia, pendidikan multikultural terintegrasi dalam mata pelajaran lain terutama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tujuan artikel ini, mendeskripsikan implementasi pendidikan multikultural dalam menyikapi keberagaman di sekolah inklusi. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka.

Kata Kunci: *pendidikan multikultural, keberagaman, sekolah inklusi.*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga Negara Indonesia, tak terkecuali mereka yang berkebutuhan khusus. Seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 5 Ayat 1, bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Selama ini, Anak Berkebutuhan Khusus disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis kekhususannya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Namun, Sekolah Luar Biasa (SLB) masih menjadi tembok pemisah bagi anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak pada umumnya, hal ini menghambat proses interaksi di antara mereka. Akibatnya anak

berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang tersingkirkan dalam interaksi sosialnya di masyarakat.

Undang-Undang di atas menunjukkan bahwa semua anak usia sekolah harus memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu, serta pendidikan untuk semua (*education for all*). Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana proses pendidikan yang ada di dalamnya kemudian tertuang dalam kebijakan-kebijakan pemerintah yang diambil dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya adalah anak berkebutuhan khusus yang harus mendapat perlakuan sama dalam memperoleh pendidikan yang layak dan bermutu.

Seiring dengan berkembangnya tuntutan kelompok berkebutuhan khusus dalam menyuarkan hak-haknya, maka kemudian muncul konsep pendidikan inklusi. Salah satu kesepakatan Internasional yang mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi adalah *Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. Pada pasal 24 dalam Konvensi ini disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan. Adapun salah satu tujuannya adalah untuk mendorong terwujudnya partisipasi penuh kelompok berkebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat. Namun dalam prakteknya sistem pendidikan inklusi di Indonesia masih menyisakan persoalan tarik ulur antara pihak pemerintah dan praktisi pendidikan.

Pendidikan multikultural dapat dirumuskan sebagai wujud kesadaran tentang keanekaragaman kultural, hak-hak asasi manusia serta pengurangan atau penghapusan jenis prasangka untuk suatu kehidupan masyarakat yang adil dan maju. Pendidikan multikultural juga dapat dijadikan instrument strategis untuk mengembangkan kesadaran atas kebanggaan seseorang terhadap bangsanya.

Sekolah memegang peranan penting dalam menanamkan nilai multikultural pada siswa. Bila mereka memiliki nilai-nilai kebersamaan, toleran, cinta damai, dan menghargai perbedaan, maka nilai-nilai tersebut akan tercermin pada tingkah laku mereka sehari-hari karena terbentuk pada kepribadiannya. Bila hal tersebut berhasil dimiliki para generasi muda kita, maka kehidupan mendatang

dapat diprediksi akan relatif damai dan penuh penghargaan antara sesama dapat terwujud.

Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Selama ini anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (difabel) disediakan fasilitas pendidikan khusus disesuaikan dengan derajat dan jenis difabelnya yang disebut dengan Sekolah Luar Biasa (SLB). Secara tidak disadari sistem pendidikan SLB telah membangun tembok eksklusifisme bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus.

Melihat kontroversi tersebut, pendidikan multikultural lebih melihat bahwa siswa umum dengan siswa berkebutuhan khusus adalah lebih manusiawi dan akan lebih memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling belajar secara langsung dalam sebuah kehidupan nyata di sekolah tentang bagaimana cara berinteraksi, memahami, bersikap dan menghormati orang lain. Oleh karena itu, penulis ingin membahas pemahaman tentang implementasi pendidikan multikultural dalam menyikapi keberagaman di sekolah inklusi.

Pembahasan

1. Pendidikan Multikultural

Pendidikan multikultural dikemukakan oleh M. Ainul Yaqin (2005: 25) bahwa pendidikan multikultural adalah strategi pendidikan yang diaplikasikan pada semua jenis mata pelajaran dengan cara menggunakan perbedaan-perbedaan cultural yang ada pada peserta didik, seperti perbedaan etnis, agama, bahasa, gender, kelas social, ras, kemampuan dan umur agar proses belajar menjadi efektif dan mudah. Lebih lanjut Ainul mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural juga untuk melatih dan membangun karakter siswa agar mampu bersikap demokratis, humanis dan pluralis dalam lingkungan mereka. Dengan kata lain, melalui pendidikan multikultural peserta didik diharapkan dapat dengan mudah memahami, menguasai, memiliki kompetensi yang baik, bersikap dan

menerapkan nilai-nilai demokratis, humanisme dan pluralisme di sekolah dan di luar sekolah.

Fokus pendidikan multikultural, H.A.R. Tilaar (2002: 15) mengungkapkan bahwa dalam program pendidikan multikultural, fokus tidak lagi diarahkan semata-mata kepada kelompok sosial, agama, dan kultural mainstream. Pendidikan multikultural sebenarnya merupakan sikap peduli dan mau mengerti ataupun pengakuan terhadap orang lain yang berbeda.

Menurut James A. Banks (2002: 14), pendidikan multikultural adalah cara memandang realitas dan cara berpikir, dan bukan hanya konten tentang beragam kelompok etnis, ras, dan budaya. Secara spesifik, Banks menyatakan bahwa pendidikan multikultural dapat dikonsepsikan atas lima dimensi, yaitu:

- a. Integrasi konten ; pepaduan konten menangani sejauh mana guru menggunakan contoh dan konten dari beragam budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep, prinsip, generalisasi serta teori utama dalam bidang mata pelajaran atau disiplin mereka.
- b. Proses penyusunan pengetahuan; sesuatu yang berhubungan dengan sejauh mana guru membantu siswa paham, menyelidiki, dan untuk menentukan bagaimana asumsi budaya yang tersirat, kerangka acuan, perspektif dan prasangka di dalam disiplin mempengaruhi cara pengetahuan disusun di dalamnya.
- c. Mengurangi prasangka; dimensi ini fokus pada karakteristik dari sikap rasial siswa dan bagaimana sikap tersebut dapat diubah dengan metode dan mater pengajaran.
- d. Pedagogi kesetaraan; pedagogi kesetaraan ada ketika guru mengubah pengajaran mereka ke cara yang akan memfasilitasi prestasi akademis dari siswa dari berbagai kelompok ras, budaya, dan kelas sosial. Termasuk dalam pedagogi ini adalah penggunaan beragam gaya mengajar yang konsisten dengan banyaknya gaya belajar di dalam berbagai kelompok budaya dan ras.
- e. Budaya sekolah dan struktur sekolah yang memberdayakan; praktik pengelompokan dan penamaan partisipasi olah raga, prestasi yang tidak proporsional, dan interaksi staf, dan siswa antar etnis dan ras adalah beberapa

dari komponen budaya sekolah yang harus diteliti untuk menciptakan budaya sekolah yang memberdayakan siswa dari beragam kelompok, ras, etnis dan budaya.

2. Sekolah Inklusi

Sekolah inklusi merupakan salah satu bentuk pemerataan dan bentuk perwujudan pendidikan tanpa diskriminasi dimana anak berkebutuhan khusus dan anak-anak pada umumnya dapat memperoleh pendidikan yang sama. Sekolah Inklusi merupakan sekolah reguler (biasa) yang menerima anak berkebutuhan khusus dan menyediakan sistem layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan anak tanpa kebutuhan khusus (ATBK) dan anak berkebutuhan khusus melalui adaptasi kurikulum, pembelajaran, penilaian, dan sarana prasarannya. Sekolah inklusi memiliki siswa heterogen dengan menempatkan siswa berkebutuhan khusus dengan siswa normal dalam satu lingkungan. Heterogenitas dalam sekolah inklusi terdiri dari perbedaan ras, suku, agama, bahasa, bahasa, kondisi fisik dan mental

3. Implementasi Pendidikan Multikultural di Sekolah Inklusi

Sebagai sekolah inklusi penyesuaian pendidikan (*adaptive education*) terhadap perbedaan-perbedaan siswanya secara efektif dan mengembangkan kemampuan mereka. Model pendidikan multikultural yang diterapkan adalah dengan melakukan penggabungan antara anak berkebutuhan khusus dengan anak normal. Yakni model kelas reguler dengan *pull out*, anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus. Penggabungan ini merupakan konsep pendidikan multikultural, bahwa pendidikan itu untuk semua ABK juga memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan, sehingga pembelajaran juga harus mengakomodasi mereka. Dalam implementasi pendidikan multikultural diterapkannya baik di dalam kelas maupun di luar kelas.

a. Implementasi Pendidikan Multikultural di Dalam Kelas.

Penyelenggaraan pendidikan multikultural di sekolah inklusif menuntut adanya penyesuaian baik dari segi kurikulum, sarana dan prasarana pendidikan,

maupun sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan ABK yang ada di dalam sekolah inklusi. Namun, pendidikan multikultural tidak harus berdiri sendiri, tetapi dapat terintegrasi dalam mata pelajaran dan proses pendidikan yang ada di sekolah termasuk keteladanan para guru dan orang-orang dewasa di sekolah. Seperti ditulis Azyumardi Azra (2001: 78-91) bahwa pengimplementasian pendidikan multikultural dapat diterapkan di sekolah dan masyarakat secara keseluruhan dengan cara memasukkan materi yang memiliki nilai multikultural.

Bentuk yang paling sederhana adalah menambahkan aspek multikultural ke dalam kurikulum yang standar. Oleh karena itu, pendidikan multikultural haruslah mencakup hal yang berkaitan dengan toleransi, perbedaan etno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan mengantarkan terbentuknya masyarakat madani yang cinta perdamaian serta menghargai perbedaan. Isi dari pendidikan multikultural harus diimplementasikan berupa tindakan-tindakan, baik di sekolah maupun di masyarakat.

Pendidikan multikultural tidak hanya diberikan lewat teori, atau dengan menambahkan ke dalam kurikulum yang sudah ada, tetapi juga melalui praktik mengajar seperti disisipkan pada materi yang membahas masalah keberagaman, seperti IPS, Pendidikan Agama dan Pendidikan Kewarganegaraan.

Pendidikan multikultural melalui pendidikan Kewarganegaraan dan pendidikan Agama serta pendidikan lainnya, harus dilakukan secara komprehensif. Dimulai dari desain perencanaan dan kurikulum melalui proses penyisipan, pengayaan dan atau penguatan terhadap berbagai kompetensi yang telah ada, mendesain proses proses pembelajaran yang bisa mengembangkan sikap siswa untuk bisa menghormati hak-hak orang lain, tanpa membedakan latar belakang ras, agama, bahasa dan budaya.

Dari aspek metode, strategi dan manajemen pembelajaran merupakan aspek penting dalam penerapan pendidikan multikultural, karena manajemen serta proses-proses pembelajaran merupakan praktik dan prosedur yang memungkinkan guru mengajar dan siswa belajar.

Dalam proses pembelajaran di sekolah inklusi banyak sekali materi serta proses pembelajaran yang memuat tentang nilai-nilai multikultural dan saling menghargai antara yang satu dengan yang lainnya, baik oleh siswa ataupun guru serta komponen lainnya.

b. Implementasi Pendidikan Multikultural di Luar Kelas.

Kegiatan-kegiatan kesiswaan merupakan suatu wadah atau kegiatan-kegiatan yang positif agar siswa dapat menyalurkan bakat, minat ataupun kreatifitasnya pada kegiatan-kegiatan non akademik. Kegiatan ekstrakurikuler antara lain dalam bidang olah raga, seni, ilmu pengetahuan ataupun keagamaan. Kegiatan-kegiatan kesiswaan diantaranya adalah kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler.

Kesimpulan dan saran

Paradigma multikulturalisme dibutuhkan dalam menyikapi perbedaan dalam masyarakat yang majemuk. Sekolah inklusi adalah corak pendidikan yang menampung peserta didik dengan keberagaman kemampuan fisik dan mental. Pendidikan multikultural diyakini mampu menyamakan keberadaan perbedaan yang memicu kesenjangan sosial.

Manfaat pendidikan multikultural dalam sekolah Inklusi adalah peserta didik ABK tidak merasa dieksklusifkan dan membantu dalam perkembangan kedewasaan dan kemandirian. Tuntutan lingkungan pendidikan dan diimbangi pembinaan yang memadai mampu, mampu menumbuhkembangkan peserta didik reguler sebagai manusia multikulturalis.

Dukungan dari orangtua anak berkebutuhan khusus, orangtua siswa regular, maupun masyarakat baru berupa dukungan moral. Dukungan yang dibutuhkan sebenarnya berupa dukungan material maupun keterlibatan langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Dukungan pemerintah baik pusat maupun daerah sangat dibutuhkan baik dalam bantuan teknis (keterlibatan dalam pelaksanaan: monitoring, pembimbingan maupun evaluasi pelaksanaan pendidikan) maupun bantuan non-teknis (dana maupun peralatan).

Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. (2001). *Pendidikan islam: tradisi dan modernisasi menuju millinium baru*. Jakarta: Penerbit Kalimah.
- Banks, James A. 2002. *An introduction to multicultural education*. Boston-London: Allyn and Bacon Press.
- Convention on the Rights of Person with Disabilities and Optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007.
- Tilaar, H.A.R. (2002). *Perubahan sosial dan pendidikan: pengantar paedagogik transformatif untuk indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Yaqin, M. Ainul. (2005). *Pendidikan multikultural: cross-cultural understanding untuk demokrasi dan keadilan*. Yogyakarta: Pilar Media.